

**KEBIJAKAN REFORMASI FISKAL  
UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
PASCA PANDEMI COVID-19**

Publica Indonesia Utama

2023

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**KEBIJAKAN REFORMASI FISKAL  
UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
PASCA PANDEMI COVID-19**

Venti Eka Satya  
Edmira Rivani  
Dewi Restu Mangeswuri  
Niken Paramita Purwanto

Publica Indonesia Utama  
2023

\*\*\*

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Kebijakan Reformasi Fiskal untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 / Venti Eka Satya, Edmira Rivani, Dewi Restu Mangeswuri, Niken Paramita Purwanto | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta: Publica Indonesia Utama - 2023

xiv + 82 Hlm; 14,8 X 21 cm

**ISBN:**

Cetakan Pertama, Desember 2022

**Judul:**

**Kebijakan Reformasi Fiskal untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19**

Penulis : Venti Eka Satya, Edmira Rivani, Dewi Restu Mangeswuri,  
Niken Paramita Purwanto  
Editor :  
Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute  
Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2023

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022  
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta  
publicaindonesiautama@gmail.com

## KATA PENGANTAR

Dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, negara telah mengerahkan instrumen fiskal secara ekstra. Peningkatan pengeluaran yang cukup signifikan dan tekanan pada penerimaan akibat kontraksi perekonomian telah memperdalam defisit anggaran. Pada tahun 2020, defisit fiskal anggaran mencapai 6,1% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dan rasio utang mengalami peningkatan hingga mencapai 39,4% dari PDB. Meskipun pada akhir tahun 2021 Indonesia berhasil bangkit dari resesi dengan pertumbuhan ekonomi 5,2% (yoy), akan tetapi defisit anggaran masih cukup tinggi yakni 4,65% dari PDB. Agar bisa *soft landing* dalam mencapai target defisit dibawah 3% pada tahun 2023, maka pada tahun 2022, pemerintah melakukan reformasi fiskal. Reformasi fiskal dilakukan dalam rangka memperkuat fondasi perekonomian. Arah kebijakan fiskal tahun 2022 berfokus pada pemulihan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural. Guna mendukung kebijakan fiskal, tiga reformasi fiskal dijalankan pemerintah yaitu reformasi pendapatan pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak, reformasi penganggaran belanja melalui *spending better*, serta pembiayaan.

Buku ini membahas mengenai kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah serta pelaksanaannya. Salah satu langkah nyata untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi adalah melalui reformasi fiskal yang sekaligus menjadi strategi dalam menjaga momentum pemulihan jangka pendek hingga menengah. Pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah tahun 2022, adalah mengoptimalkan pendapatan negara, mendorong

penguatan belanja yang berkualitas, serta mengoptimalkan pembiayaan anggaran. Dari sisi pemerintah daerah, reformasi fiskal diwujudkan melalui penguatan desentralisasi fiskal dalam mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Salah satu upaya untuk mendukung penguatan desentralisasi fiskal tersebut dengan disahkannya UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Reformasi kebijakan fiskal ini tidak akan berhasil dan dapat mencapai tujuannya tanpa dukungan berbagai pihak, termasuk DPR RI. DPR RI melalui fungsi anggarannya hendaknya senantiasa mengawasi dan fokus pada upaya pelaksanaan reformasi penerimaan negara, belanja dan pembiayaan APBN.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada para Analis Legislatif yang telah menghasilkan karya tulis ilmiah (KTI) yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai reformasi kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai target defisit dibawah 3% dengan *soft landing*. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada *Dr. Ira Novianty, S.E., M.Si., Ak., CA., CAAT* yang telah meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan masukan dan koreksian dan melakukan kegiatan editorial lainnya sehingga buku ini layak untuk diterbitkan. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, September 2020  
Kepala Pusat Penelitian  
Badan Keahlian DPR RI

Ahmad Sani Al Husein, S. E., M.S.

# PROLOG

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak pertengahan Maret 2020 tidak hanya berdampak besar terhadap kesehatan, tetapi juga perekonomian Indonesia. Pandemi Covid-19 menyisakan permasalahan yang kompleks di berbagai sektor yang harus segera ditangani, khususnya permasalahan di sektor ekonomi. Pemerintah terus berupaya untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kestabilan daya beli masyarakat, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat pengangguran dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, percepatan pemulihan ekonomi nasional menjadi program prioritas pemerintah saat ini. Dengan adanya program pemulihan ekonomi ini diharapkan target pemerintah untuk mencapai defisit dibawah 3% di tahun 2023 dapat *soft landing*.

Untuk mewujudkan program prioritas ini, pemerintah telah membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dengan menyusun berbagai kebijakan keuangan negara terutama dalam sektor penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran negara. Kebijakan pengelolaan keuangan ini dikenal sebagai kebijakan fiskal. Tantangan pemulihan ekonomi ini menjadi berat karena selain pemulihan ekonomi di dalam negeri pascapandemi Covid-19, pemerintah juga dihadapkan pada permasalahan resesi global. Pemerintah terus berupaya mencari cara dan strategi agar dapat mengelola keuangan lebih efektif dan program-program prioritas dapat tercapai melalui kebijakan reformasi fiskal.

Buku ini akan memaparkan bagaimana cara pemerintah dalam melakukan reformasi terhadap kebijakan fiskal melalui optimalisasi pendapatan negara berupa pajak, melakukan belanja yang efektif dan berkualitas, penganggaran yang efektif, penyediaan dana melalui pembiayaan, dan memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Reformasi kebijakan ini tentu saja tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tetapi harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, sehingga koordinasi dan hubungan fiskal antara pusat dan daerah harus kuat.



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Prolog .....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
<b>Bab I</b>	
<b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>Bab II</b>	
<b>Kebijakan Reformasi Fiskal Indonesia .....</b>	<b>8</b>
A. Fungsi Kebijakan Fiskal.....	9
B. Kebijakan Fiskal Indonesia .....	11
C. Reformasi Fiskal Indonesia.....	13
<b>Bab III</b>	
<b>Optimalisasi Pendapatan Negara .....</b>	<b>20</b>
A. Sumber Pendapatan Negara .....	21
B. Kinerja Perpajakan Nasional .....	24
C. Reformasi Perpajakan .....	31
D. Reformasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	33
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam....	35
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Migas .....	36
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Nonmigas.....	38

4. PNBP SDA Pertambangan Minerba.....	38
5. PNBP SDA Kehutanan .....	40
6. PNBP SDA Perikanan.....	40
7. PNBP SDA Panas Bumi.....	41
8. PNBP Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan.....	41
9. PNBP Lainnya .....	42
E. Pelaksanaan Perpajakan Internasional.....	42
<b>Bab IV</b>	
<b>Pengelolaan Belanja Negara .....</b>	<b>44</b>
A. Penguatan Kualitas Belanja .....	46
B. Kebijakan Belanja Negara .....	50
<b>Bab V</b>	
<b>Pembiayaan Anggaran .....</b>	<b>60</b>
A. Kebijakan Pembiayaan dalam Rangka Reformasi Fiskal ...	61
<b>Bab VII</b>	
<b>Penutup .....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan .....	67
B. Rekomendasi.....	70
Epilog.....	71
Daftar Pustaka .....	72
Indeks .....	75
Biografi Editor.....	78
Biografi Penulis.....	79

# DAFTAR TABEL

**Tabel V.1.** Proyeksi Inflasi Global Tahun 2022-2023 (%).....15

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar IV.1.</b> Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (YoY) Tahun 2019-2022 .....	3
<b>Gambar IV.2.</b> Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022-2023 .....	4
<b>Gambar IV.3.</b> Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2023 Dalam APBN Tahun .....	4
<b>Gambar V.1.</b> Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2022-2023 (%) .....	14
<b>Gambar V.2.</b> Rasio Pendapatan dan Belanja Terhadap PDB Tahun 2010-2021 .....	16
<b>Gambar V.3.</b> Rasio Defisit Anggaran Terhadap PDB Tahun 2010-2021 .....	17
<b>Gambar V.4.</b> Perkembangan Defisit pada Masa Pandemi Covid-19 (% PDB).....	17
<b>Gambar VI.1.</b> Perkembangan Penerimaan Perpajakan (Triliun Rp) .....	26
<b>Gambar VI.2.</b> Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2016 dan 2020 .....	28
<b>Gambar VII.1.</b> Model Reformasi Penguatan Kualitas Belanja	48
<b>Gambar VII.2.</b> Efisiensi Alokatif .....	51
<b>Gambar VII.3.</b> Efisiensi Teknis .....	52
<b>Gambar VII.4.</b> Konsep Efisiensi Ekonomi .....	53
<b>Gambar VII.5.</b> Proses Kebijakan Fiskal dan Penganggaran...	54
<b>Gambar VII.6.</b> Perkembangan Belanja Negara (Triliun Rupiah) ..	56

<b>Gambar VIII.1.</b> Rasio Utang Terhadap PDB.....	62
<b>Gambar VIII.2.</b> Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 2017-2022 (Miliar USD) .....	63
<b>Gambar VIII.3.</b> Komposisi Utang Indonesia Per Januari 2022....	64



## EPILOG

Reformasi kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional pascapandemic Covid-19. Pemulihan ekonomi nasional menjadi prioritas agar pemerintah tidak masuk kedalam jurang resesi. Inovasi, strategi, dan cara-cara yang dibangun pemerintah dalam mengelola keuangan negara diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan daya beli masyarakat, menekan tingkat pengangguran, dan mendorong ekonomi lebih produktif. Berbagai kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah memerlukan dukungan dan sinergi dari semua kalangan, baik masyarakat maupun sektor bisnis, terlebih ditengah tantangan ekonomi global yang sedang lesu, maka perekonomian nasional menjadi sangat penting untuk dibangkitkan.

Reformasi kebijakan fiskal diharapkan menjadi momentum terbukanya harapan baru yang lebih baik, menghidupkan semangat untuk bangkit bersama, bersinergi dengan harmonis, dan pulih lebih cepat dari hantaman badai buruk selama pandemic Covid-19. Reformasi kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, dengan mendahulukan program-program prioritas pemerintah, tidak akan mustahil bahwa Indonesia akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N., and Govindarajan. *Management Control System, Ninth Edition*. New Jersey: Mc Graw Hill, 1998.
- Badan Kebijakan Fiskal. “Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022: Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural,” 2021.
- Badrudin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Brahmbhatt, Milan, and Otaviano Canuto. “Fiscal Policy for Growth and Development.” *Is Fiscal Policy the Answer?*, no. October (2012): 1-22. [https://doi.org/10.1596/9780821396308\\_overview](https://doi.org/10.1596/9780821396308_overview).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. “Meningkatkan Kualitas Belanja Pemerintah,” n.d.
- Fathurrahman. “Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi. Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi.” *Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi. Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi* 12, no. April (2012): 82.
- Ibrahim, Zaini. *Pengantar Ekonomi Makro*. Banten: (Lembaga Peneelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2013.
- IMF\_WEO. “IMF World Economic Outlook July 2022,” 2022, 1-19. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022>.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 6th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.



- Kementerian Keuangan RI. "APBN KITA Kinerja Dan Fakta, Kaleidoskop 2021." Jakarta, 2022.
- . "KEBIJAKAN FISKAL 2022 : MENDUKUNG PEMULIHAN DAN REFORMASI." *Konfrensi Pers/SP-43/KLI 2021*, 2021.
- . "Sekilas Tentang Analisis Kebijakan Belanja Publik/ Negara," 2017. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/42f818c1-8b0a-4731-8dea-cddcd6a6dc13>.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Musgrave, Richard A. "The Theory of Public Finance." *The Economic Journal* 69, no. 276 (1956): 766–70.
- Nizar & Afdi, Muhammad. "Pillars of Fiscal Policy." *APBN Newsletter* 1, no. 4 (2017): 8.
- Nurul Hayati. "2021, Kinerja Perekonomian Global Mengalami Penguatan." *Metro7.Co.Id*. 2022. <https://metro7.co.id/info-ibu-kota/2021-kinerja-perekonomian-global-mengalami-penguatan/2022/>.
- Perekonomian, Kemenko. "Indonesia Recent Economic Development," no. September (2022).
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Rahayu, W., and D. Kurniawati. "Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi (JPIA)* 1, no. 1 (2020): 95–107.
- RI, Kementerian Keuangan. "Ini Tiga Reformasi Fiskal Tahun 2022," 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-tiga-reformasi-fiskal-tahun-2022/>.
- RI, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR. *Perkembangan Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi, Jenis, Dan Organisasi Tahun 2018-2021*. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2020.
- Sadono, Sukirno. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagafindo Persada, 2011.

- Setyawan, Herry. "Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak 2021, Momentum Penyehatan APBN." Accessed October 30, 2022. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/tercapainya-realisasi-penerimaan-pajak-2021,-momentum-penyehatan-apbn>.
- Stephen, Wilson. *Fiscal Monitor: Achieving More with Less. International Monetary Funds*, 2017.
- Sudirman, Wayan. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Suminto. "Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara." Jakarta: Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan, 2004.
- Supriyono. *Akuntansi Manajemen I: Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Dan Proses Perencanaan*. Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Syamsudin, Bayu Tri Cahya, and Syahrina Nurmala Dewi. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi Sumber Daya* 17, no. 1 (2015).
- Widyatama, Agus. "Kualitas Belanja Pemerintah." Accessed October 30, 2022. <https://feb.ub.ac.id/id/kualitas-belanja-pemerintah.html>.

# INDEKS

## A

Alokasi 45

Anggaran 8, 11, 15, 17, 20, 29, 39, 46, 55, 60, 62, 63, 68, 73, 74

## B

Belanja 12, 16, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 69, 72, 73, 74

## C

Covid-19 v, vii, 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 40, 55,  
56, 64, 67, 71

## D

Daerah vi, viii, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 41, 56, 60, 68, 70, 72, 73, 78, 79, 81

DAK 45, 59

Dana 45, 56, 59

DAU 45, 59

Defisit 17, 62

## E

Efisiensi 49, 51, 52, 53, 57, 58

Ekonomi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 38, 53, 57, 67, 72, 73,  
74, 79, 80, 81

## F

Fiskal 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 25, 27, 38, 49, 54, 57, 61, 72, 73,  
74

## **I**

Inflasi 15  
Investasi 79

## **K**

Kebijakan vii, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 32, 33, 35, 38,  
49, 50, 54, 57, 61, 67, 72, 73, 74, 79, 80, 81  
Kebijakan fiskal 6, 8, 9, 11, 67  
Keuangan vi, 2, 5, 6, 11, 12, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 31, 36, 39, 48, 50, 51,  
56, 60, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 79  
Kinerja 2, 6, 12, 24, 25, 37, 38, 41, 73, 74

## **M**

Makro 8, 18, 21, 25, 38, 57, 72, 73  
Modal 61

## **N**

Nasional iv, 5, 7, 15, 24, 39, 61, 67, 81

## **P**

Pajak v, 2, 5, 21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 67, 73, 74, 81  
PDB v, 1, 2, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 25, 33, 34, 53, 55, 56, 61, 62, 63, 67, 68,  
70  
Pembiayaan 19, 60, 61, 62, 81  
Pemerintah vi, vii, viii, 2, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 26, 28, 31, 35, 41,  
43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 69,  
70, 72, 73, 74, 78, 79, 81  
Pemulihan 2, 5, 7, 15, 18, 25, 38, 57, 67, 71, 72  
Penerimaan 2, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 74  
Penerimaan Negara Bukan Pajak 2, 33, 35, 36, 38  
Pengangguran siklikal 9  
Pengelolaan 11, 20, 38, 39, 44, 69, 74, 79  
Perekonomian 2, 3, 73, 79  
Perencanaan 8, 74  
Perpajakan 21, 24, 26, 28, 31, 42, 69  
Pertumbuhan 3, 4, 12, 14, 21, 25, 35, 36, 73, 74  
Program 5, 20, 47

Publik 12, 50, 73, 79, 80, 81

Pusat vi, viii, 2, 11, 19, 23, 41, 49, 55, 56, 58, 68, 69, 70, 73, 79, 80, 81

## **R**

Realisasi 2, 12, 16, 17, 30, 31, 40, 56, 57, 74

Reformasi v, vi, viii, 2, 5, 7, 8, 13, 15, 18, 25, 29, 31, 33, 38, 48, 57, 58, 61, 67, 69, 71, 72, 73

## **S**

Stabilitas 15, 27, 67

## **U**

Utang 60, 62, 63, 64

## BIOGRAFI EDITOR



**Ira Novianty S.E., M.Si., Ak., CA., CAAT** adalah seorang Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Selain sebagai dosen, beliau juga seorang peneliti di bidang akuntansi Pemerintahan, seorang trainer kompetensi akuntansi, dan seorang asesor pada Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi.

Beliau juga salah satu perumus kebijakan akuntansi di salah satu Pemerintah Daerah di Jawa Barat, menjadi narasumber di berbagai kegiatan ilmiah, dan di lingkup pemerintahan. Lahir di Bandung pada tanggal 16 November 1976 dan menjadi anak pertama dari dua bersaudara. Beliau menyelesaikan studi Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Padjadjaran pada tahun 2018 dan menjadi seorang dosen sejak tahun 2000. Sertifikasi kompetensi yang dimiliki adalah sertifikasi di bidang teknisi akuntansi dan manajemen risiko.

## BIOGRAFI PENULIS



**Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak., C.A.** menyelesaikan studi Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi. Sejak tahun 2009 bekerja di Sekretarian Jenderal DPR RI sebagai Peneliti dengan bidang kepakaran Ekonomi

Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa topik penelitian yang pernah dilakukan diantaranya, Analisis Penyelenggaraan Pengelolaan Kekayaan Negara Sumber Daya Alam, Strategi Kebijakan Investasi pada Era Otonomi Daerah, serta Strategi Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Mendukung Perekonomian Daerah. Karya tulis ilmiah penulis juga telah dipublikasikan di beberapa jurnal, *proceeding* dan dalam bentuk buku. Beberapa judul karya tulis tersebut diantaranya, *The Effect of Local Government Income on Community Welfare by Using Expenditures as Mediating Variable*, **Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sustainable Development**, serta Investasi dan Sistem Pengelolaan Investasi Pemerintah. Sebagai bagian dari *supporting system* Dewan, penulis juga terlibat dalam beberapa kegiatan kedewanan seperti, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Undang-Undang dan kinerja pemerintah, serta lain-lain sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui email: [venti.satya@dpr.go.id](mailto:venti.satya@dpr.go.id).



**Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.**, lahir di Jakarta 10 September 1986, menyelesaikan studi S1 jurusan Statistika - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S2) Jurusan Statistika Terapan - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian. Tahun 2011 penulis terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, kemudian pada tahun 2015 penulis terlibat dalam penyusunan RUU tentang Minyak dan Gas. Penulis juga menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah tentang ekonomi dan kebijakan publik seperti: Perubahan Struktur Ekonomi Tenaga Kerja dan Analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) Dalam Mengelompokkan Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi (2014), Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN *China Free Trade Area* (2015), Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Berkelanjutan (2015), dll. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: [3dm1r4.er@gmail.com](mailto:3dm1r4.er@gmail.com).





**DEWI RESTU MANGESWURI, S.E., M.Si.** lahir di Klaten, 6 Mei 1982. Menyelesaikan studi Sarjana dan Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta jurusan Akuntansi. Jabatan saat ini adalah Analis Legislatif Ahli Muda di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. KTI yang pernah dipublikasikan terkait kepakaran yaitu: Pilihan Kebijakan Peningkatan Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bandung (Buku Tim, 2021), Potensi, Perkembangan, Dan Strategi Wisata Halal Daerah: Kasus Daerah Mayoritas Nonmuslim di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali (Buku Tim, 2020), Upaya Mengatasi Praktik Kartel di Indonesia (Jurnal Kajian, 2019), Kesiapan Pemerintah Daerah Kota Bandung Jawa Barat dalam Memanfaatkan Teknologi Disruptif bagi Pengembangan Ekonomi Wilayah (Buku Tim, 2019), Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2016). Tergabung dalam tim kerja penyusunan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional. Penulis dapat dihubungi di: [dewi.mangeswuri@dpr.go.id](mailto:dewi.mangeswuri@dpr.go.id)



**NIKEN PARAMITA PURWANTO**, lahir di Jakarta, 25 Juni 1977. Pendidikan S1 Manajemen diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta tahun 2000, dan Pendidikan S2 Akuntansi diselesaikan di Magister Akuntansi Universitas Indonesia pada Tahun 2004. Bekerja sebagai Peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik pada Pusat Penelitian

Badan Keahlian DPR RI saat ini terlibat aktif dalam penelitian di bidang ekonomi dan kebijakan publik. Email: [niken.paramita@dpr.go.id](mailto:niken.paramita@dpr.go.id).